

2025

LAPORAN LKIP DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyusun LKIP Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi di Bidang Pekerjaan Umum selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2025 dapat direalisasikan dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Kota Bekasi. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 disusun, merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Bekasi, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air,



IDISUTANTO,ST.,MM.,MT

Pembina/ IV.a

NIP. 19770223 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT	2
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.5 SUMBER DAYA.....	5
1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS	8
1.7 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	10
1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 VISI DAN MISI RPJMD 2025-2029.....	13
2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
3.3 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	49
3.4 REALISASI ANGGARAN	56
BAB IV PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 P Klasifikasi Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	6
Tabel 1. 2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	6
Tabel 1. 3 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Golongan Tahun2025	6
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	7
Tabel 1.5 Isu Strategis DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2024	15
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2025	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2025	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan DBMSDA Tahun 2025(Perubahan)	19
Tabel 3. 1 Capain Kinerja Sasaran Stategis Tahun 2025	22
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	33
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capain Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025	34
Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran	35
Tabel 3.5 Program, Kegiatan Pendukung Indiktor Indesk Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	36
Tabel 3.6 6 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga	37
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	46

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025	46
Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran	48
Tabel 3.10 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur ketataairan	49
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Metode	53
Tabel 3.12 Analisis Program yang menunjang pencapaian kinerja DBMSDA Tahun 2025	55
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2025	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
--------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan yang Baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
2. Mendorong Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dinas BMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas BMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi:

- a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau;
- b. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi;
- c. Pengembangan Jasa Konstruksi
- d. Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Perubahan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut. Dampak dari hal tersebut salah satunya ialah terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Dinas BMSDA memiliki tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas BMSDA melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

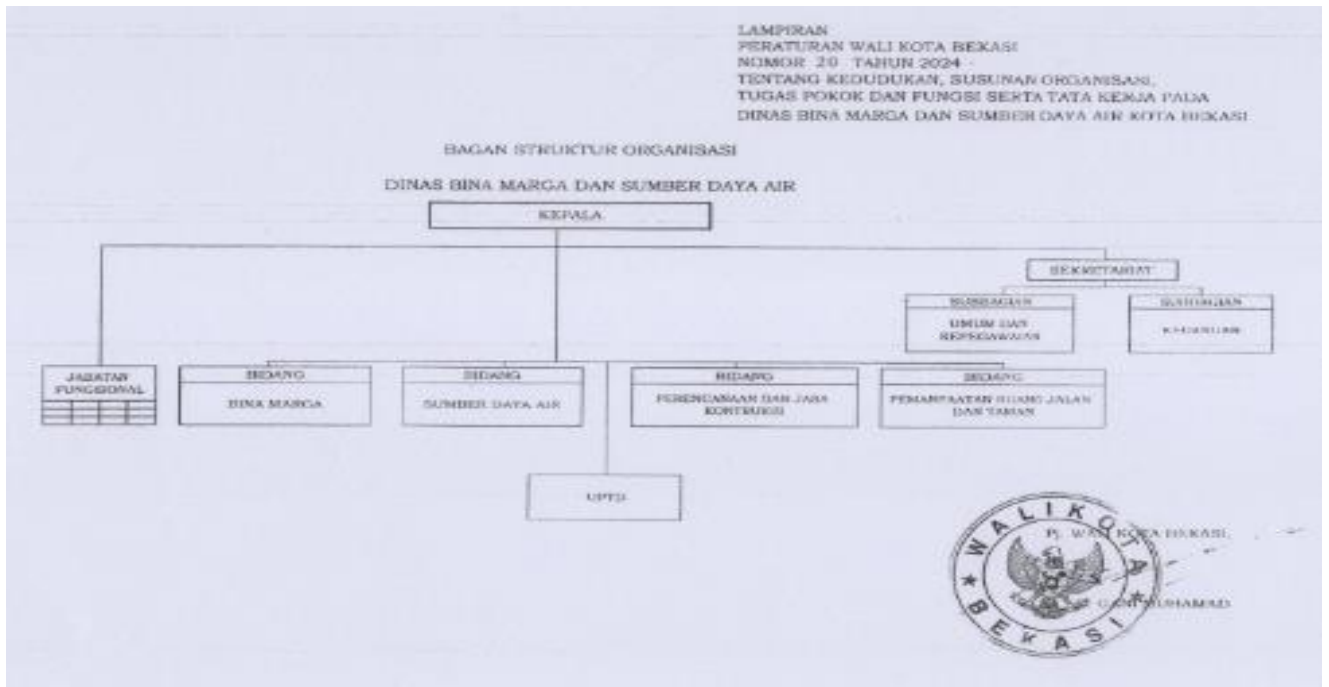
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan.
- 3. Bidang Bina Marga;
- 4. Bidang Sumber Daya Air;
- 5. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 6. Bidang Pemanfaatan Ruang Jalan dan Taman;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DBMSDA



1.5 SUMBER DAYA

a. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi saat ini memiliki aparat/ personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2025 sebanyak 269 pegawai dengan rincian 110 pegawai negeri sipil dan 159 PPPK. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	98
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	161
	Jumlah	259

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

Sebanyak 110 orang PNS di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dengan sebagian besar adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 60 orang PNS. Struktur pendidikan SDM Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	20
2	Strata 1	52
3	Diploma 3	1
4	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	20
5	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4
6	Sekolah Dasar	1
	Jumlah	98

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

Tabel 1. 3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	72
3	Golongan II	16
4	Golongan I	0
	Jumlah	98

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

Tabel 1. 4 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (PPPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	80
2	Diploma 3	11
3	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	66
4	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	2
5	Sekolah Dasar	2
	Jumlah	161

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

b. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Selain Sumber Daya Manusia yang diperlukan untuk mendukung jalannya suatu Organisasi Perangkat Daerah juga membutuhkan aset berupa sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan

prasarana yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut.

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan	2.275 m ²	√		
2	Gedung	1	√		
3	Listrik	28	√		
4	Telepon	1	√		
5	Area Parkir	1	√		
6	Ruang Rapat	1	√		
7	Ruang Arsip	2	√		
8	Kendaraan Roda 4	64	59		5
9	Kendaraan Roda 2	63	58		5
10	Kendaraan Roda 6	34	√		
11	Kendaraan Roda 3	8	√		
12	Meja Rapat	11	7	4	
13	AC	67	49	18	
14	Komputer PC	50	45	5	
15	Komputer Notebook	26	22		4
16	Printer	91	60	31	
17	Meja Kerja	354	√		
18	Kursi Kerja	354	√		
19	Pompa Banjir	123	√		
20	Pintu Air	102	√		
21	Screen Projector	5	√		
22	Proyektor/Infocus	5	√		
23	Scanner	10	√		
24	Drone	2	√		
25	Mesin Penghancur Kertas	3	√		
26	Sound System	5	√		
27	Meteran Dorong	37	√		
28	Thermometer Aspal	1	√		
29	Lemari Besi	20	√		
30	Lemari Arsip Pintu Kaca	10	√		
31	Rak Besi Arsip	16	√		
32	Lemari Kerja	6	√		
33	Sofa	4	√		
34	Stamper	5	√		
35	Tandem Roller	3	√		
36	Camera Video	3	√		

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
37	Drill Machine	9	√		
38	Alat Pemeriksa Beton	1	√		
39	Concrete Hammer Set	2	√		
40	Excavator	8	√		

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, DBMSDA Kota Bekasi, 2025

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS

a. ASPEK STRATEGIS

Kota Bekasi yang memiliki luas 213,04 km² terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi. Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) membangun Kota Bekasi. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global- internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kota Bekasi telah menjelma menjadi Kota Megapolitan yang mengandalkan Jasa dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Roda Perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan Urusan serta Kewenangan yang dimilikinya, DBMSDA Kota Bekasi Berkomitmen mendukung infrastruktu di Kota Bekasi.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek aspek

yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Bekasi yang nyaman dan Sejahtera.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

b. ISU STRATEGIS

Berikut ini isu-isu strategis terkait pelayanan infrastruktur di Kota Bekasi:

Tabel 1.6 Isu Strategis DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD REGIONAL	ISU STRATEGIS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	5
Kota Bekasi	Pembinaan Penataan Ruang sebagai Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 78,8% di 2029 dari <i>baseline</i> 77% pada tahun 2024	Pengendalian infrastruktur telekomunikasi secara terpadu	Perlunya perapihan kabel serat optik di udara menjadi kabel jaringan di bawah tanah	Penataan infrastruktur Telekomikasi dengan metode ducting
Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi	Penilaian Pemanfaatan Ruang pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 78,8% di 2029 dari <i>baseline</i> 77% pada tahun 2024	Beautifikasi papan reklame kota	Perlunya penggantian papan reklame konvensional menjadi digital	Penataan reklame konvensional menjadi digital menggunakan videotron
Kalimalang, Kota Bekasi	Target Persentase Tersedianya Luasan RTH	Penyediaan ruang terbuka	Perlu adanya penambahan	Pengembangan ruang terbuka

	Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan Perkotaan pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 48,08% dari <i>baseline</i> 44,87% tahun 2024	publik	ruang terbuka publik berupa kawasan wisata air	publik dan wisata air.
Kemang Pratama dan Simpang Bantargebang; Jalan Pahlawan dan Jalan Bulak Kapal	Target Tingkat Kemantapan Jalan pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 97,97% dari <i>baseline</i> 97,75% tahun 2024	Peningkatan infrastruktur jalan	Perlunya penambahan <i>flyover</i> dan <i>underpass</i> untuk mengurangi kemacetan	Pembangunan <i>flyover</i> , <i>underpass</i> , dan/atau simpang
Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bekasi	Target Persentase Peningkatan Fasilitas Prasarana Penunjang Transportasi pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 61,21% dari <i>baseline</i> 49,50% tahun 2024	Peningkatan infrastruktur penunjang transportasi	Perlunya perpanjangan stasiun yang berbasis transit Oriented Development (TOD) untuk membantu integrasi transportasi antar moda	Perpanjangan stasiun (<i>extension</i>) dan jembatan layang <i>connecting skybridge</i>
Kota Bekasi	Target Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yang ditargetkan mencapai angka 72,55% dari <i>baseline</i> 68,91% tahun 2024	Penambahan lahan untuk pengendalian genangan air	Perlunya penambahan jumlah dan pemeliharaan polder	Penambahan jumlah polder di Kota Bekasi

Sumber : Renstra Dinas BMSDA Tahun 2025-2029

1.7 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas BMSDA diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Layanan Perbaikan Jalan Umum

Produk layanan yang diberikan antara lain surat permohonan perbaikan jalan umum

b. Layanan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan

Produk layanan yang diberikan antara lain Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang milik Jalan.

c. Layanan peil Banjir

Produk layanan yang diberikan antara lain advis teknis peil banjir.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kota, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Selanjutnya, Rencana Strategis beserta rencana dan capaian target kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 VISI DAN MISI RPJMD 2025-2029

Sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam mendukung visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- Visi :

Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera

- Misi :

Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan visi dan misi dimaksud, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang kemudian dijabarkan kedalam 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Penyelenggaraan Jalan;
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka menengah, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Berikut tabel tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	
				2025	2026 (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamarga an, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembang an kehati		Presentase Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembang an kehati		
		terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	79,18%	80,52%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	59,48%	60,57%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan Pelaksanaan	69,32%	70,83%
			pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	100%	100%
			Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA		
	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaann ya				
		Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaann ya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	BB	BB

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	
				2025 (5)	2026 (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
VISI(2025-2029) : Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera MISI (2025-2029) : Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan yang memadai	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan yang memadai		IKLI Bina Marga dan Ketataairan	70	70.5
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga	70	70.5
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	70	70.5

Sumber Data : RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 DBMSDA Kota Bekasi

Sehubungan pada tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra 2025-2029 maka untuk tujuan dan sasaran di jabarkan pada table 2.1 terdapat perbedaan antara Tujuan sasaran berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2029, untuk Tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2024-2026 memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran, berbeda dengan tujuan sasaran berdasarkan renstra 2025-2029 memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran.

Perbedaan Tujuan Dinas BMSDA Kota Bekasi berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025 2029 berbeda dikarenakan tujuan renstra harus mendukung Indikator tujuan pada RPJMD tahun 2025-2029 yaitu indeks Kepuasan layanan Infrastruktur, Selain itu sasaran Meningkatnya Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaan dengan indikator sasaran Tingkat Akuntabiiltas Kinerja DBMSDA dihapus pada renstra 2025-2029 di karenakan sasaran ini sudah masuk pada sasaran kota sehingga tidak dicantumkan kembali pada sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Perjanjian kinerja DBMSDA tahun 2025 mengalami perubahan dimana pada awal perjanjian kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan rencana kinerja yang mengacu pada renstra DBMSDA Tahun 2025-2029. Dilihat dari isi perjanjian kinerja memuat sasaran strategis indikator kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi, Berikut ini tabel Sasaran Kinerja, Indikator dan Target yang akan di capai dalam perjanjian kinerja dan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DBMSDA Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA		BB

2	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	%	79,16
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	%	59,46
		Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	%	69,32
		Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	%	100

Sumber : Sekretariat DBMSDA 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Rp. 40.058.844.952
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 38.908.570.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan system Drainase	Rp. 237.575.431.080
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 258.395.603.310
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.520.535.430
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 2.430.000.000
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 24.758.562.000

Pada tabel 2.3 menjelaskan Perjanjian Kinerja Awal pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang mengacu pada RPD Kota Bekasi 2024-2026, dimana Dinas BMSDA memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5(lima) indikator Kinerja.

Pada Bulan September Dinas BMSDA Menyusun Perkin Perubahan karena terjadinya Perubahan dalam Strategi dan Anggaran . Perkin Perubahan mengacu pada RPJMD Kota 2025-2029 dan APBD Perubahan 2025, Dimana Dinas BMSDA memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2(dua) inidktor Kinerja.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan DBMSDA Tahun 2025

NO (1)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(2)	(3)	
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Tataairan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Tataairan	70

Sumber Data: Perkin Perubahan DBMSDA 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 39.429.955.018
	kabupaten/ Kota	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 38.205.531.714
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan system Drainase	Rp. 227.962.558.373
4	Program Penyelenggaraan Jalan	348.522.579.791
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.432.550.430
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.1.573.741.000
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp27.733.435.292
	(KEHATI)	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Bekasi.

2.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi

atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

$\geq 100\%$ = Target Tercapai

$< 100\%$ = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Dinas BMSDA Kota Bekasi selama Tahun 2025 merupakan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Dinas BMSDA Tahun 2025. Tetapi pada pencapaian kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan indikator yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Capaian sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	RPD 2024-2026	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA	BB	BB	100%
1.1		Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	79,18%	80,52%	101,69%
			Persentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	59,48%	59,48%	100%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	69,32%	69,32%	100%
			Presentase Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	100%	100%	100%
1	RPJMD 2025-2029	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Kebinamarga dan Ketataairan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	70	70,51	100,73%
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	70	70,46	100,66%

Sumber : Data Evaluasi Internal DBMSDA Tahun 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis di tahun 2025 mengalami peralihan yaitu berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029, analisa peralihan sasaran startegis yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, yaitu Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan beriorientasi lingkungan diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase terlaksananya penanganan infrastruktur dan optimalisasi preservasi Jalan dengan capaian kinerja (terlampai);
2. Persentase terlaksananya penanganan infrastruktur dan optimalisasi preservasi Drainase Perkotaan dengan capaian kinerja 100%(tercapai)
3. Persentase terlaksananya penanganan infrastruktur Prasarana Jalan dengan capain 100% 9tercapai);
4. Persentase pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA dengan capaaian 100%, maka dapat dikatakan sasaran strategis Dinas BMSDA Kota Bekasi Terlaksananya penanganan infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman dan berorientasi Lingkungan.

b. Sasaran strategis berdasarkan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Kebinamarga dan Ketataairan diukur dengan dua indikator yaitu:

1. IKLI Kebinamargaan memperoleh nilai realisasi sebesar **70,51**, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,00. Dengan demikian tingkat capaian terhadap target adalah 100,72%. Hal ini menunjukan kinerja layanan

Kebinamargaan secara agregat telah memenuhi bahkan sedikit melampaui standar target indeks 7.

2. IKLI Ketataairan memperoleh nilai realisasi sebesar **70,46** dibanding target yang ditetapkan sebesar 70,00. Tingkat capaian terhadap target adalah 100,66%. Hal ini menunjukkan kinerja layanan Ketataairan juga telah memenuhi target indeks 7.

Beberapa yang perlu diperhatikan dari angka capaian ini adalah bahwa capaian agregat yang memenuhi target tidak selalu berarti seluruh aspek layanan sudah baik merata. Dalam struktur IKLI, beberapa sub indikator memiliki keterbatasan data sehingga nilai dapat terpengaruh oleh mekanisme substitusi/persepsi (survei kepuasan) atau penalti

2.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.2.1 Sasaran Strategis : Meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan dan Ketataairan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan



Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan pada IKLI DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025 memperoleh nilai realisasi sebesar 70,51. Nilai ini

melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,00 (target indeks 7), sehingga tingkat capaian kinerja adalah 100,73%.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat layanan kebinamargaan (jalan dan jembatan) telah memenuhi ekspektasi kinerja minimal yang ditargetkan. Namun demikian, struktur pembentuk indeks memperlihatkan bahwa capaian agregat banyak didukung oleh indikator yang memiliki data kuat (khususnya pada layanan jaringan jalan), sedangkan untuk kelompok indikator jembatan terdapat keterbatasan ketersediaan data teknis sehingga diperlukan indikator persepsi masyarakat sebagai penguat dan substitusi pada komponen yang belum terukur.

IKLI Kebinamargaan dibentuk oleh beberapa sub indikator layanan, yaitu:

1. Sub Indikator Kualitas dan Kondisi Jalan
2. Sub Indikator Aksesibilitas dan Konektivitas Jalan
3. Sub Indikator Kualitas dan Kondisi Jembatan
4. Sub Indikator Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jalan/Jembatan
5. Sub Indikator Aksesibilitas dan Konektivitas Jembatan
6. Sub Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Jalan dan Jembatan

Dasarkan indikator administratif infrastruktur, sementara Sub Indikator Survei Kepuasan Masyarakat dinilai berdasarkan persepsi masyarakat. Sub indikator ini memiliki dua peran penting:

- Representasi persepsi layanan, yang menunjukkan bagaimana masyarakat merasakan kualitas layanan infrastruktur (bukan hanya kondisi teknis).
- Komponen penyeimbang apabila terdapat sub indikator/indikator teknis tertentu yang tidak memiliki data dan harus dikenakan penalti atau tidak bisa dinilai secara kuantitatif penuh.

1. Sub Indikator Kualitas dan Kondisi Jalan (Nilai 76,00)

Jika tidak memperhitungkan sub indikator berbasis persepsi masyarakat, maka capaian terbaik dalam IKLI Kebinamargaan berada pada Sub Indikator Kualitas dan Kondisi

Jalan dengan nilai 76,00. Sub indikator ini menggambarkan tingkat kemantapan dan kualitas pelayanan jaringan jalan dari sisi teknis-operasional, termasuk kondisi jalan, penurunan kerusakan, hingga pemeliharaan rutin.

Sub indikator ini dibentuk oleh aspek/indikator berikut:

- Jalan kondisi mantap
- Titik jalan rusak
- Kebersihan dan perawatan jalan
- (serta indikator lain seperti: ketersediaan flyover/underpass, marka jalan, fasilitas keselamatan jalan, sistem pengawasan dan pemeliharaan jalan)

Pada tahap deskripsi ini, indikator yang tersedia datanya untuk kelompok ini adalah indikator berikut.

a. Jalan Kondisi Mantap

Indikator jalan kondisi mantap menunjukkan tingkat kemantapan jaringan jalan kota berdasarkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan total panjang jaringan jalan yang dikelola. Nilai indikator ini sebesar 97,92%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh jaringan jalan berada dalam kondisi layak layanan dan mampu menopang mobilitas harian di wilayah perkotaan.

Data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

- Total panjang jaringan jalan kota sebesar 4.676,19 km
- Panjang jalan kondisi baik sebesar 4.579,00 km
- Panjang jalan kondisi rusak sebesar 96,95 km

Secara deskriptif, kondisi ini memperlihatkan bahwa backlog jalan rusak relatif kecil (sekitar 2,08% dari total jaringan), sehingga indikator ini memberikan kontribusi yang kuat terhadap nilai sub indikator kualitas dan kondisi jalan.

b. Titik Jalan Rusak

Indikator titik jalan rusak menggambarkan kinerja pengelola jalan dalam menurunkan panjang jalan rusak dari tahun sebelumnya. Nilai indikator ini sebesar

64,63%, yang menunjukkan bahwa penurunan jalan rusak telah terjadi secara signifikan namun belum sepenuhnya mencapai target perbaikan yang ditetapkan. Data pembentuk indikator:

- Panjang jalan kondisi rusak tahun 2024: 208,51 km
- Panjang jalan kondisi rusak tahun 2025: 96,95 km
- Selisih penurunan kerusakan: 111,56 km
- Target penurunan kerusakan: 150 km

Dengan demikian, terdapat penurunan kerusakan sebesar 111,56 km, namun capaian ini masih berada di bawah target penanganan sebesar 150 km. Hal ini menunjukkan adanya gap kinerja yang perlu diperhatikan, terutama untuk menjaga konsistensi peningkatan kualitas layanan jalan jangka menengah.

c. Kebersihan dan Perawatan Jalan

Indikator kebersihan dan perawatan jalan menggambarkan cakupan pemeliharaan rutin terhadap ruas jalan yang membutuhkan perawatan. Nilai indikator ini sebesar 75,00%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan prioritas telah memperoleh perawatan rutin, namun masih terdapat porsi ruas yang belum tertangani.

Data pembentuk indikator:

- Total ruas jalan kota yang memerlukan perawatan: 180 km
- Ruas jalan yang mendapatkan perawatan rutin: 135 km
- Ruas jalan yang tidak mendapatkan perawatan rutin: 45 km

Cakupan perawatan rutin sebesar 75% memperlihatkan bahwa sistem pemeliharaan telah berjalan, tetapi masih terdapat sekitar 25% ruas prioritas yang belum memperoleh pemeliharaan rutin. Kondisi ini berpotensi memicu kerusakan berulang, terutama pada ruas dengan tekanan lalu lintas tinggi atau drainase sisi jalan yang kurang baik.

d. Data Tidak Tersedia pada Aspek Lain dalam SubIndikator Ini

Selain ketiga indikator di atas, dalam kelompok “Kualitas dan Kondisi Jalan” terdapat beberapa aspek lain yang secara konsep seharusnya dinilai, yaitu:

- ketersediaan flyover dan underpass/terowongan
- ketersediaan marka jalan
- fasilitas keselamatan jalan
- sistem pengawasan dan pemeliharaan jalan

Namun pada file perhitungan yang tersedia, data kuantitatif pendukung untuk aspek-aspek tersebut belum tersedia secara lengkap sehingga tidak dapat dijelaskan detail pada tahap deskripsi ini (dan akan tercermin sebagai 1. nilai rendah/penalti pada sub indikator lain, terutama sub indikator aksesibilitas dan keselamatan).

2. Sub Indikator Aksesibilitas dan Konektivitas Jalan

Sub indikator ini menggambarkan keterjangkauan layanan jaringan jalan terhadap wilayah dan dukungan konektivitas terhadap mobilitas perkotaan (termasuk aspek akses layanan dan keterhubungan). Nilai sub indikator ini sebesar 47,97 dan menjadi salah satu sub indikator dengan capaian paling rendah dibanding sub indikator lainnya.

Untuk tahap awal, indikator yang tersedia adalah indikator layanan jaringan jalan.

a. Layanan Jaringan Jalan

Indikator layanan jaringan jalan menunjukkan cakupan wilayah kota yang telah terlayani oleh jaringan jalan. Capaian indikator ini sebesar 100,00%, yang berarti seluruh wilayah Kota Bekasi (berdasarkan data administrasi) telah memiliki akses layanan jaringan jalan.

Data pembentuk indikator:

- Luas wilayah Kota Bekasi: 210,49 km²
- Luas wilayah yang terlayani jaringan jalan: 210,49 km²
- Luas wilayah yang belum terlayani jaringan jalan: 0,00 km²

Capaian ini menunjukkan bahwa dari sisi pemerataan akses fisik jaringan jalan, layanan telah menjangkau seluruh wilayah administrasi kota.

b. Data Tidak Tersedia pada Kelompok Aksesibilitas & Konektivitas Jalan

Dalam sub indikator ini, terdapat beberapa indikator yang belum tersedia datanya sehingga mempengaruhi nilai akhir sub indikator, antara lain (mengacu pada sheet perhitungan):

- Keterhubungan antar ruas (data total ruas penghubung utama dan ruas yang terhubung antar hierarki belum tersedia),
- Jalur alternatif (data koridor strategis yang memiliki jalur alternatif belum tersedia)
- Akses pengguna rentan (data panjang ruas yang dilengkapi fasilitas akses pengguna rentan belum tersedia).

Kondisi ketidaktersediaan data ini berimplikasi pada:

1. Terbatasnya kemampuan IKLI untuk memotret kondisi konektivitas secara utuh, dan
2. Kebutuhan tindak lanjut berupa penguatan basis data layanan jalan yang tidak hanya berbasis kondisi fisik, tetapi juga aspek operasional (PJU, fasilitas keselamatan, kemacetan, dan integrasi transportasi umum).

3. Sub Indikator Jembatan

Berdasarkan hasil kompilasi data pada file IKLI, aspek layanan jembatan pada Sub Bidang Kebinamargaan belum dapat dinilai secara memadai karena keterbatasan ketersediaan data teknis. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai beberapa sub indikator yang terkait jembatan, yang secara metodologis dapat diinterpretasikan sebagai indikasi penalti akibat missing data atau tidak terisinya variabel pembentuk.

Kondisi ini penting untuk dijelaskan secara eksplisit dalam laporan karena:

1. IKLI bersifat berbasis data (data-driven index), sehingga ketiadaan data akan menyebabkan indeks tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi faktual.
2. Penilaian yang rendah pada kelompok jembatan tidak otomatis berarti layanan jembatan buruk, melainkan dapat disebabkan oleh belum tersedianya inventarisasi/pemutakhiran data sesuai kebutuhan indikator.

Dengan demikian, nilai IKLI Kebinamargaan tetap memenuhi target, namun hasil agregat tersebut harus dibaca sebagai capaian dengan catatan adanya keterbatasan data pada kelompok layanan jembatan.

a. Sub Indikator Kualitas dan Kondisi Jembatan

Sub indikator ini seharusnya menggambarkan tingkat kelayakan fisik dan keberfungsian jembatan sebagai infrastruktur penghubung utama. Namun pada perhitungan IKLI tahun berjalan, data kuantitatif yang diperlukan untuk membentuk nilai indikator belum tersedia secara lengkap.

Sub indikator ini dibentuk oleh aspek berikut:

(1).Jembatan kondisi baik

Aspek ini membutuhkan data seperti:

- total jumlah/panjang jembatan,
- klasifikasi kondisi jembatan (baik/sedang/rusak/rusak berat),
- hasil inspeksi struktur (bangunan atas, bangunan bawah, lantai jembatan, dll).

Namun dalam dokumen IKLI yang dihitung, data kondisi teknis jembatan belum tersedia, sehingga indikator ini belum dapat dihitung secara rasional berbasis data.

(2). Kebersihan dan perawatan jembatan

Aspek ini membutuhkan data seperti:

- cakupan kegiatan pemeliharaan rutin,
- jumlah jembatan yang mendapatkan perawatan,
- frekuensi pembersihan/pemeliharaan,
- backlog perawatan.

Namun pada penghitungan ini, tidak terdapat data rekap perawatan jembatan, sehingga indikator tidak dapat menggambarkan performa operasional pemeliharaan aset jembatan.

Implikasi: tanpa data kondisi dan perawatan, evaluasi kualitas layanan jembatan tidak dapat dilakukan secara objektif. Maka nilai rendah pada sub indikator ini

merupakan konsekuensi langsung dari keterbatasan data, bukan kesimpulan mutu layanan.

b. Sub Indikator Keamanan dan Keselamatan Pengguna Jembatan (Data Tidak Tersedia)

Sub indikator ini seharusnya menilai bagaimana jembatan memberi perlindungan keselamatan kepada pengguna (kendaraan dan pejalan kaki), serta kesiapan sistem monitoring agar risiko struktur dapat dikendalikan.

Sub indikator ini dibentuk oleh aspek berikut:

(1). Keamanan dan keselamatan jembatan

Indikator ini membutuhkan data seperti:

- ketersediaan pagar pengaman, penerangan, marka/rambu,
- kondisi railing,
- fasilitas pejalan kaki,
- lokasi jembatan rawan kecelakaan/kerusakan.

Namun pada perhitungan IKLI ini, data fasilitas keselamatan jembatan tidak tersedia, sehingga indikator belum dapat menggambarkan kondisi keamanan secara kuantitatif.

(2). Pengawasan dan pemantauan jembatan

Indikator ini membutuhkan data seperti:

- keberadaan jadwal inspeksi rutin,
- cakupan jembatan yang diperiksa,
- mekanisme database monitoring,
- tindak lanjut hasil inspeksi.

Namun tidak terdapat data sistem pengawasan/pemantauan jembatan, sehingga indeks tidak dapat menilai aspek tata kelola keselamatan jembatan.

Implikasi: aspek keselamatan jembatan adalah komponen berisiko tinggi. Ketiadaan data pada indikator ini merupakan gap serius karena menutup kemampuan indeks untuk membaca potensi risiko kegagalan struktur.

c. Sub Indikator Aksesibilitas dan Konektivitas Jembatan (Data Tidak Tersedia)

Sub indikator ini seharusnya menilai fungsi jembatan tidak hanya sebagai aset fisik, tetapi sebagai simpul konektivitas wilayah yang mempengaruhi akses masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sub indikator ini dibentuk oleh aspek berikut:

(1). Jembatan sebagai konektivitas aksesibilitas masyarakat

Indikator ini membutuhkan data seperti:

- peran jembatan sebagai penghubung permukiman,
- konektivitas ke pusat layanan publik,
- keterhubungan antar wilayah kota,
- akses terhadap jaringan jalan utama.

Namun pada penghitungan IKLI ini, tidak ada data yang dapat mengukur fungsi konektivitas aksesibilitas, sehingga penilaiannya belum dapat dilakukan secara objektif.

(2). Jembatan sebagai konektivitas ekonomi masyarakat

Indikator ini membutuhkan data seperti:

- konektivitas menuju kawasan ekonomi (pasar, industri, logistik),
- jumlah/proporsi jembatan pada koridor ekonomi strategis,
- tingkat gangguan mobilitas akibat kondisi jembatan.

Namun data konektivitas ekonomi jembatan tidak tersedia, sehingga indikator tidak dapat dihitung.

(3). Ketersediaan jalur alternatif

Indikator ini membutuhkan data seperti:

- jembatan/koridor yang memiliki rute alternatif,

- tingkat redundansi jaringan,
- kesiapan sistem jika terjadi penutupan jembatan utama.

Pada perhitungan saat ini, data jalur alternatif tidak tersedia, sehingga aspek ketahanan sistem konektivitas jembatan tidak dapat dinilai.

d. Catatan Metodologis (Konsekuensi pada I KLI)

Dengan tidak tersedianya data pada indikator-indikator jembatan, maka:

1. Nilai sub indikator jembatan tidak merepresentasikan performa riil, melainkan merepresentasikan *keterbatasan informasi*.
2. Hasil IKLI Kebinamargaan yang memenuhi target harus dibaca dengan catatan bahwa komponen jembatan belum menjadi input yang kuat dalam pembentukan nilai indeks tahun berjalan.
3. Diperlukan tindak lanjut penguatan basis data jembatan (inventarisasi dan monitoring) agar IKLI tahun berikutnya benar-benar mencerminkan capaian layanan secara menyeluruh.

Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan

Sasaran	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Tataairan		
Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	70	70,51	100,73%

Sumber :Data Evaluasi internal Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga sebesar 70 dengan realisasi 70,51 maka capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100,73%, maka capaian telah terlampaui.

a. Perbandingan capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur KebinaMarga tidak bisa dibandingkan dengan indikator Tahun 2024 karena untuk indikator Tahun 2024 mengacu pada RPD 2024-2026 dan indikator pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 Kota Bekasi.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capain Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	Target	77,85%	-
		Realisasi	79,79%	-
		Capaian	102,5%	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Target	-	70
		Realisasi	-	70,51
		Capaian	-	100,73%

Sumber :Data Evaluasi internal Kota Bekasi Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Indikator Kinerja sasaran Kebinamargaan terjadi perbedaan indikator, dikarenakan pada Tahun 2024 menggunakan data pada Renstra 2024- 2026 dan untuk tahun 2025 menggunakan data pada Renstra 2025-2029. Pada Tahun 2025 telah dilantiknya wali Kota dan wakil wali Kota Bekasi sehingga ditetapkan Visi dan Misi Wali Kota terpilih serta disusun RPJMD 2025-2029.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan antara lain sebagai berikut :

1. Pengalokasian Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Jalan yang merupakan program Penunjang Utama dalam Ketercapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan sebesar 51% dari anggaran Dinas;
2. Ketersediaan Infrastruktur yang memadai, dengan adanya SK Jalan No. 600.1.7/Kep.327-DBMSDA/VII/2024 tentang Status Ruang Jalan di Kota Bekasi;
3. Adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan yang mengatasi kerusakan secara proaktif ditunjang dengan adanya TIM URC Sitambel sehingga dapat melakukan perbaikan kerusakan secara cepat dan responsive terhadap keluhan dari Masyarakat.
4. Indikator Pengukuran yang relevan dan terukur ketepatan waktu perbaikan jalan, respon laporan jalan rusak, pemantauan tren kepuasan dari Survey SKM yang dilakukan secara berkala.
5. Keterlibatan Masyarakat: partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi (Musrenbang wilayah) sehingga Masyarakat bisa memberikan masukan, kritik dan saran yang ditindaklanjuti.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten : Pekerja yang memiliki keahlian teknis , pengetahuan kebinamargaan dengan telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi sebanyak 371 tenaga kerja pada Dinas BMSDA melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan Anggaran / Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	70	70,51	100,73%
	Anggaran yang Dibutuhkan	426.309.261.531	372.061.556.204	87,27%
Nilai Efisiensi				13,46%

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan adalah program Program penyelenggaraan jalan, Program penyelenggaraan jalan terdapat 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Program Pendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	355.139.579.791
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.573.741.000
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.432.550.430
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	27.733.435.292
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.429.955.018
JUMLAH		426.309.261.531

Sumber Data : Emonev DBMSDA 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat 10 sub kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan, dari semua target sub Kegiatan hampir semua tercapai dan terdapat satu sub kegiatan yang melampaui target yaitu sub kegiatan Pemeliharaan rutin

jalan. Dimana pada Sub kegiatan ini Tim URC bekerja secara cepat dan responsive terhadap pengaduan dari Masyarakat. Selain Program Penyelenggaraan jalan terdapat juga program yang menunjang indikator indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Kebinamargaan, sebagai berikut :

Tabel 3.6 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Bina Marga

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2024 97,75	Targe t Tahun 2025 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 100
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	%		97,79	97,79	
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	31,24	37,14	37,13	100
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Tingkat pengaduan masyarakat terkait reklame dan utilitas jalan yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100
4		Persentase penambahan taman kota	%	23,67	24,98	24,98	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100	100
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	84	86,53	86,88	100,4
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		82	83	84,89	102,28
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	89,73	91,13	91,67	100,59

Sumber : Data Evaluasi Internal DBMSDA Tahun 2025

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing indikator Program, sebagai berikut :

1. Tingkat Kemanatapan Jalan Tahun 2025 dengan Capaian kinerja sebesar 100 % didukung oleh 11 sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp.355.139.579.791 dengan realisasi 311.892.593.502 (87,82%), maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,46 %.
2. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil dengan capain 100% didukung oleh 9 sub Kegiatan dengan Pagu 1.573.741.000 dan realisasi sebssar 1.028.316.630, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 34%.
3. Persentase Tingkat pengaduan masyarakat terkait reklame dan utilitas jalan yang ditindaklanjuti dengan capaian kinerja 100%, didukung oleh 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran 2.432.550.430 dan realisasi anggaran sebesar 1.415.637.363, maka terdapat efisiensi anggaran 42 %.
4. Persentase penambahan taman kota dengan capain kinerja 100 % didukung oleh 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran 27.733.435.292 dan realisasi anggaran 23.469.880.949, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,37%.
5. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran dengan capaian sebsesar 100% disukung oleh 2 sub kegiatandengan pagu anggaran 317.420.000.
6. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan dengan capain 100,4% didukung oleh 9 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 35.678.700.018.
7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah dengan capaian 102,28% didukung oleh 1 sub kegiaan dengan pagu anggaran 736.390.000
8. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran dengan capaiam 100,59 % didukung oleh 6 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebsesar 2.939.390.000

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan



Indikator Ketataairan dalam KLI DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 70,46. Nilai ini mencapai dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,00 (target indeks 7). Dengan demikian tingkat capaian indikator adalah 100,66%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara agregat layanan ketataairan yang dikelola DBMSDA Kota Bekasi telah berada pada level yang sesuai target kinerja. Namun, hasil pembentukan indikator memperlihatkan bahwa kontribusi kinerja didominasi oleh aspek kondisi fisik/fungsi dan keandalan layanan, sementara aspek keamanan-keselamatan serta fasilitas pendukung masih tertinggal, termasuk akibat keterbatasan ketersediaan data pada beberapa indikator.

Indikator Ketataairan dibentuk oleh lima kelompok sub indikator sebagai berikut:

1. Sub Indikator Kondisi Fisik dan Fungsi
2. Sub Indikator Keandalan dan Keberlanjutan
3. Sub Indikator Keamanan dan Keselamatan

4. Sub Indikator Fasilitas Pendukung
5. Sub Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Polder dan Drainase

3. SUB INDIKATOR KONDISI FISIK DAN FUNGSI

Sub indikator ini menggambarkan kondisi fisik dan tingkat kesiapan fungsi prasarana ketataairan utama Kota Bekasi. Nilai sub indikator sebesar 80,77 menunjukkan bahwa komponen dasar ketataairan seperti drainase, polder, tanggul, pintu air, dan tampungan limpasan secara umum berada pada kondisi baik dan mendekati kebutuhan layanan. Sub indikator ini dibentuk oleh lima indikator rinci berikut.

a. Kondisi Drainase

Indikator kondisi drainase menggambarkan persentase saluran drainase yang berada dalam kondisi tidak tersumbat dibanding total panjang saluran drainase kota. Capaian indikator sebesar 71,70% menunjukkan bahwa sebagian besar saluran drainase telah berfungsi secara fisik, namun masih terdapat segmen yang tersumbat atau menurun kapasitasnya sehingga tetap berpotensi menimbulkan genangan lokal pada titik-titik tertentu.

Komponen data pembentuk:

- Total panjang saluran drainase kota: 5.495,00 km
- Saluran drainase kondisi tidak tersumbat: 3.939,90 km

Berdasarkan data tersebut, masih terdapat sekitar 1.555,10 km saluran yang belum berada pada kondisi tidak tersumbat ($\pm 28,30\%$ dari total), yang menjadi catatan penting untuk pemeliharaan rutin dan program normalisasi.

b. Ketersediaan Polder

Indikator ketersediaan polder menggambarkan tingkat ketercapaian pembangunan polder terhadap target yang ditetapkan sampai tahun 2025. Capaian sebesar 92,00% menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana polder sudah sangat baik dan mendekati target.

Komponen data pembentuk:

- Total kebutuhan ideal polder: 112 unit
- Unit polder dibangun sampai 2024: 45 unit
- Unit polder dibangun 2025: 1 unit
- Target pembangunan polder sampai 2025: 50 unit

Dengan total pembangunan hingga 2025 sebesar 46 unit, capaian terhadap target 50 unit adalah 92%

c. KetersediaanTanggul

Indikator ketersediaan tanggul menunjukkan tingkat ketercapaian pembangunan panjang tanggul sampai tahun 2025 terhadap target pembangunan tanggul yang direncanakan. Nilai indikator sebesar 69,76% mengindikasikan bahwa pembangunan tanggul masih belum memenuhi target dan menjadi salah satu aspek yang relatif tertinggal dibanding indikator fisik lainnya.

Komponen data pembentuk:

- Total kebutuhan ideal tanggul: 128,789 km
- Panjang tanggul dibangun sampai 2024: 53,2 km
- Panjang tanggul dibangun 2025: 4 km
- Target pembangunan tanggul sampai 2025: 82 km

d. Kondisi Pintu Air

Indikator kondisi pintu air menggambarkan persentase pintu air yang berfungsi optimal dibanding total pintu air yang tersedia. Capaian indikator sebesar 91,30% menunjukkan bahwa perangkat pengendali aliran pada sistem drainase/polder secara umum telah berfungsi baik.

Komponen data pembentuk:

- Total unit pintu air kota: 92 unit
- Pintu air berfungsi optimal: 84 unit
- Pintu air tidak berfungsi optimal: 8 unit

e. Kapasitas Tampungan Limpasan

Indikator kapasitas tampungan limpasan menggambarkan tingkat pemenuhan kapasitas tampungan kota dibanding kebutuhan ideal. Nilai capaian sebesar 81,25% menunjukkan bahwa kapasitas tampungan telah cukup baik, namun

belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan tampungan limpasan secara keseluruhan.

Komponen data pembentuk:

- Total kebutuhan kapasitas tampungan kota: 3,2 juta m³
- Kapasitas tampungan tersedia: 2,6 juta m³
- Kekurangan kapasitas tampungan: 0,6 juta m³

2. SUB INDIKATOR KEANDALAN DAN KEBERLANJUTAN

Sub indikator ini menggambarkan performa layanan ketataairan dalam mengendalikan genangan dan banjir secara sistemik serta menjamin keberlanjutan operasi melalui pemeliharaan rutin. Nilai sub indikator sebesar 80,80 menunjukkan bahwa keandalan layanan ketataairan cukup baik dan mendekati kondisi stabil, meskipun kinerja pengendalian banjir masih belum sepenuhnya mencapai target.

Sub indikator ini dibentuk oleh tiga indikator rinci berikut.

a. Bebas Genangan

Indikator bebas genangan menggambarkan persentase luas wilayah kota yang terbebas dari genangan dibanding luas wilayah kota secara keseluruhan. Capaian sebesar 95,30% menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Bekasi telah terbebas dari genangan.

Komponen data pembentuk:

- Luas wilayah Kota Bekasi: 210,49 km²
- Luas wilayah masih tergenang: 9,895 km²
- Luas wilayah bebas genangan: 201 km²

b. Kinerja Pengendalian Banjir

Indikator kinerja pengendalian banjir menggambarkan tingkat capaian penurunan kejadian banjir dibanding target penurunan kejadian yang ditetapkan. Capaian sebesar 72,50% menunjukkan terdapat penurunan kejadian banjir, namun belum memenuhi target penurunan.

Komponen data pembentuk:

- Jumlah kejadian banjir tahun 2024: 350 kejadian •
- Jumlah kejadian banjir tahun 2025: 321 kejadian •
- Penurunan kejadian banjir: 29 kejadian
- Target penurunan kejadian banjir: 40 kejadian

c. Sistem Pengawasan & Pemeliharaan Drainase dan Polder

Indikator ini menggambarkan persentase unit drainase primer dan polder yang terpantau melalui inspeksi rutin. Nilai capaian 69,23% menunjukkan mekanisme pengawasan sudah berjalan namun belum mencakup seluruh unit.

Komponen data pembentuk:

- Total unit drainase primer & polder: 13 unit
- Unit terpantau melalui inspeksi rutin: 9 unit
- Unit belum terpantau rutin: 4 unit

3. SUB INDIKATOR KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Sub indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan masyarakat dari risiko keselamatan, perlindungan aset akibat air berlebih, serta respons terhadap pengaduan layanan ketataairan. Nilai sub indikator sebesar 43,61 menunjukkan bahwa aspek perlindungan sosial dan keselamatan pengguna masih belum optimal, serta terdapat indikator yang tidak didukung data memadai sehingga mempengaruhi hasil penilaian.

Sub indikator ini dibentuk oleh tiga indikator berikut.

a. Keamanan Fisik Drainase/ Polder

Indikator keamanan fisik menggambarkan persentase titik rawan kecelakaan di sekitar saluran/polder yang telah diamankan. Nilai sebesar 87,80% menunjukkan mayoritas titik rawan telah dilakukan pengamanan.

Komponen data pembentuk:

- Total titik rawan kecelakaan: 41 lokasi
- Titik rawan telah diamankan: 36 lokasi
- Titik rawan belum diamankan: 5 lokasi

b. Perlindungan Aset & Bangunan Masyarakat dari Dampak Air Berlebih

Indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan kawasan permukiman dan pusat aktivitas dari dampak banjir/air berlebih. Nilai capaian 20,00% menunjukkan bahwa data masih belum tersedia.

c. Penanganan Pengaduan terhadap Penerima Keamanan dan Keselamatan

Indikator ini menggambarkan tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang ketataairan. Pada pengukuran tahun 2025, indikator ini memiliki nilai 20,00%, dengan keterangan bahwa komponen data utama dinyatakan tidak tersedia.

Komponen data pembentuk:

- Jumlah laporan pengaduan ketataairan tahun 2025
- Laporan yang ditindaklanjuti
- Laporan belum ditindaklanjuti

Karena data dasar pengaduan dinyatakan tidak tersedia/valid, maka indikator ini memperoleh nilai rendah yang bersifat penalti/default dan menurunkan capaian sub indikator keamanan-keselamatan secara keseluruhan.

4. SUB INDIKATOR FASILITAS PENDUKUNG

Sub indikator fasilitas pendukung menggambarkan kesiapan sarana operasional pendukung layanan ketataairan dan sistem monitoring. Nilai sub indikator sebesar 20,00 menunjukkan kinerja terendah pada kelompok indikator ketataairan, yang pada data 2025 dipengaruhi kuat oleh ketidaktersediaan data pada sebagian besar komponen.

Sub indikator ini dibentuk oleh dua indikator:

- ketersediaan fasilitas pendukung
- ketersediaan sarana monitoring

a. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Indikator ini menggambarkan kecukupan sarana pendukung operasional (pintu air, pompa, rumah pompa, bak kontrol, sumur resapan). Nilai capaian 20,00% diberikan dengan keterangan tidak ada data pada komponen utama.

Komponen data pembentuk:

- Total unit sarana pendukung dibutuhkan
- Unit sarana pendukung tersedia
- Kekurangan unit sarana pendukung

b. Ketersediaan Sarana Monitoring

Indikator ini menggambarkan kecukupan sarana monitoring seperti sensor dan CCTV, Nilai capaian 20,00% juga disertai keterangan tidak ada data pada komponen utama, Komponen data pembentuk:

- Total kebutuhan sarana monitoring (sensor dan CCTV)
- Sarana monitoring tersedia
- Kekurangan sarana monitoring

5. SUB INDIKATOR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG POLDER DAN DRAINASE

Sub indikator survei kepuasan masyarakat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan polder dan drainase. Nilai sebesar 86,45 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dan menjadi penguat penting dalam struktur IKLI, terutama pada kondisi ketika sebagian indikator teknis mengalami keterbatasan data.

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan

Sasaran	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Bina Marga dan Ketataairan		
Indikator	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	70	70,46	100,66%

Sumber : Data Evaluasi internal Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan sebesar 70 dengan realisasi 70,46 maka capaian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100,66%, maka capaian telah tercapai.

a. Perbandingan capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur ketataairan tidak bisa dibandingkan dengan indikator Tahun 2024 karena untuk indikator Tahun 2024 mengacu pada RPD 2024-2026 dan indikator pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029 Kota Bekasi.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	Target	58,39%	-
		Realisasi	58,39%	-
		Capaian	100%	-
2		Target	-	70

	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan	Realisasi	-	70,46
		Capaian	-	100,66%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Indikator Kinerja sasaran Ketataairan terjadi perbedaan indikator, dikarenakan pada Tahun 2024 menggunakan data pada Renstra 2024-2026 dan untuk tahun 2025 menggunakan data pada Renstra 2025-2029. Pada Tahun 2025 telah dilantiknya Wali Kota dan wakil wali Kota Bekasi sehingga ditetapkan Visi dan Misi Wali Kota terpilih serta disusun RPJMD 2025-2029.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan antara lain sebagai berikut :

1. Pengalokasian Anggaran untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang merupakan program Penunjang Utama dalam Ketercapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan .
2. Ketersediaan Infrastruktur yang memadai: Adanya 46 unit polder yang telah dibangun sampai tahun 2025, Pintu air yang berfungsi dengan baik sebanyak 84 unit dan pembangun turap di sepanjang aliran Sungai.
3. Adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan. Dimana terdapat URC SDA yang bertugas melakukan pengeringan genangan akibat hujan dengan pompa, menindaklanjuti laporan dari Masyarakat terkait permasalahan drainase, melakukan pengecekan pompa, pintu air dan genset agar berfungsi dengan normal;
4. Adanya UPT Pematuan yang bertugas membersihkan saluran dan pengangkatan sedimen;

5. Adanya UPTD Alat Berat yang tugas pokoknya membersihkan saluran dengan lebar 1 meter dan akses manuver serta operasional tidak ada halangan utilitas kabel, pipa dan lain-lain;
6. Keterlibatan Masyarakat: partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi (Musrenbang wilayah) sehingga Masyarakat bisa memberikan masukan, kritik dan saran yang ditindaklanjuti.
7. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten : Pekerja yang memiliki keahlian teknis, pengetahuan kebinamargaan dan SDA dengan telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi sebanyak 371 tenaga kerja pada Dinas BMSDA melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator sasaran

No	Indikator sasaran/ kebutuhan	Targe	Realisas	Capaia
1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Ketataaia	70	70,4	100,66
	Anggaran yang	267.151.090.087		86,03
Nilai				14,63

Program yang menunjang dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur Ketataairan adalah program Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Adapun capaian kinerja indikator program sebagai berikut :

Tabel 3.10 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur ketataairan

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.	%	39,79	41,43	42,01	100
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	%	68,91	69,64	69,88	100

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing indikator Program, sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir dengan capain 100% didukung oleh 5 sub Kegiatan dengan Pagu 38.205.531.714 dan realisasi sebssar 16.149.023.968 m
2. Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baikdenga capaian 100% didukung oleh Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik didukung oleh 6 sub kegiatan dengan pagu 228.945.558.737 dan realisasisebesar 172.143.491512 dengan Tingkat capaian 75,19%

2.3 ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Dinas BMSDA Kota Bekasi turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data eksisting pegawai per Desember 2025, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi didukung oleh 269 0rang pegawai yang terdiri dari 110 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 159 pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan pelayanan untuk Masyarakat terkait tugas dan Fungsi Dina BMSDA meliputi Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air, drainase, Pengembangan Jasa Konstruksi serta Pemanfaatan Ruang Milik Jalan serta 12 UPTD pada setiap Kecamatan. Selain itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dibantu juga oleh Pekerja Harian Lepas (PHL) pada setiap Bidang. PHL membantu dalam menangani pengaduan masyarakat dan permasalahan secara cepat dan tepat di lapangan.

b. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Dalam rangka mencapai target sasaran di tahun 2025, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi melaksanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) , dengan anggaran sebesar Rp 693.460.351.618,- (enam ratus Sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD/ SILPA, DAU, DBH).

Berdasarkan data realisasi keuangan tahun 2025, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 601.881.916.271 (enam ratus satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh

puluh satu rupiah) atau bila dipresentasikan sebesar 86.79% dari total anggaran di tahun 2025. Sehingga dapat dikatakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi telah berhasil mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 88.812.804.846 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 13,21%.

e. Analisis Efisiensi Mesin/ Peralatan

Efisiensi mesin atau peralatan adalah perbandingan antara input dan output yang optimal. Efisiensi mesin yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Berdasarkan data inventaris barang milik daerah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi memiliki aset tetap berjumlah 1.506 unit dari rentan pengadaannya dimulai dari tahun 2001 hingga tahun 2025. Adapun kondisi aset tetap dimaksud, terdiri dari 1.434 unit dalam kondisi baik, 58 unit dalam kondisi rusak ringan dan 14 unit dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dapat mengefisienkan mesin atau peralatan melalui pemeliharaan aset tetap yang optimal. Hal ini ditunjukkan dari jumlah aset tetap dalam kondisi baik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset tetap dalam kondisi rusak ringan dan juga rusak berat. Dengan pemeliharaan aset tetap yang optimal secara tidak langsung berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas, mengurangi biaya, dan juga dapat meningkatkan kualitas

f. Analisis Efisiensi Material/ Bahan

Efisiensi material/bahan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan upaya optimalisasi penggunaan bahan konstruksi dan operasional agar pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan tataairan dapat mencapai output dan outcome yang maksimal dengan pemborosan seminimal mungkin. Material yang dimaksud meliputi aspal, beton, agregat, pipa, besi, geotekstil, bahan drainase, serta material pendukung lainnya.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penggunaan material pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi umumnya telah mengacu pada:

- Spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang berlaku
- Dokumen perencanaan (DED, RAB, dan gambar teknis)
- Kebutuhan riil lapangan sesuai kondisi eksisting

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti perubahan kondisi lapangan, cuaca ekstrem, serta keterbatasan pengendalian sisa material Efisiensi penggunaan material didukung oleh beberapa faktor berikut:

1. Perencanaan teknis yang matang: telah dilakukan penyusunan DED
2. Penerapan standar spesifikasi teknis: sudah diterapkan pada KAK kegiatan
3. Pengawasan lapangan yang optimal: adanya konsultan pengawasan disetiap kegiatan konstruksi
4. Koordinasi yang baik dengan penyedia jasa

Dari penjelasan diatas Dinas BMSDA telah melakukan Upaya dalam mengefisiensi material dan bahan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.

g. Analisis Efisiensi Metode

Efisiensi metode pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan kemampuan organisasi dalam menerapkan metode kerja, prosedur, dan pendekatan teknis yang tepat guna untuk mencapai hasil pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta ketataairan secara optimal, dengan waktu, biaya, dan sumber daya yang minimal namun tetap memenuhi standar mutu.

Ruang lingkup efisiensi metode meliputi metode perencanaan, metode pelaksanaan konstruksi, metode pemeliharaan, serta metode pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Berikut tabel analisis efisiensi metode yang telah dilakukan oleh Dinas BMSDA Kota Bekasi

:

Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Metode

No	Aspek / Proses Kerja	Kondisi Sebelum (Metode Lama)	Kondisi Sesudah (Metode Efisien)	Dampak Efisiensi
1	Perencanaan Teknis	Perencanaan dilakukan secara parsial dan manual	Perencanaan terintegrasi berbasis data teknis dan survei lapangan	Waktu perencanaan lebih singkat dan akurat
2	Penentuan Metode Pelaksanaan	Metode sering disesuaikan saat pelaksanaan	Metode sudah ditetapkan sejak tahap perencanaan	Mengurangi perubahan pekerjaan dan keterlambatan
3	Koordinasi Antar Unit	Koordinasi dilakukan secara konvensional	Koordinasi melalui rapat terjadwal dan media digital	Mempercepat pengambilan keputusan
4	Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	Metode kerja belum optimal sesuai kondisi lalu lintas	Metode kerja disesuaikan dengan kondisi lapangan dan waktu kerja	Mengurangi gangguan aktivitas masyarakat
5		Penanganan bersifat reaktif		
6	Pelaksanaan Pekerjaan Ketataairan	Pengawasan bersifat periodik	Penanganan preventif dan terencana Pengawasan rutin dan berbasis laporan lapangan	Menurunkan risiko genangan dan kerusakan
7	Pengawasan Lapangan	Perubahan	Mekanisme penyesuaian metode lebih sederhana	Meningkatkan ketepatan pelaksanaan
8	Penanganan Perubahan Pekerjaan Penggunaan	memerlukan waktu administrasi lama Teknologi belum dimanfaatkan optimal	Pemanfaatan alat dan sistem pendukung pekerjaan	Pelaksanaan lebih fleksibel dan cepat
9	Teknologi Evaluasi	Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan	Evaluasi dilakukan secara berkala	Produktivitas kerja meningkat
10	Pelaksanaan Dokumentasi dan Pelaporan	Dokumentasi manual dan terpisah	Dokumentasi terintegrasi dan terdigitalisasi	Perbaikan metode dapat dilakukan lebih cepat
11				Mempermudah monitoring dan evaluasi

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi didukung 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 7 kegiatan, diantaranya :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Program penyelenggaraan jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

5. Program pengembangan jasa konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

6. Program penyelenggaraan penataan ruang

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

7. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Adapun analisis program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kota Bekasi diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Analisis Program yang menunjang pencapaian kinerja DBMSDA Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET		REALISASI	
			KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	97,79	355.139.579.791	97,79	311.892.593.502
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	37,14	1.573.741.000	37,13	1.028.316.630
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tingkat pengaduan masyarakat terkait reklame dan utilitas jalan yang ditindaklanjuti	100	2.432.550.430	100	1.415.637.363
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase penambahan taman kota	24,98	27.733.435.292	24,98	23.469.880.949
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	317.420.000	100	262.338.000
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	86,53	35.678.700.018	86,88	31.128.787.878
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	83	736..390.000	84,89	656.265.250
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	91,13	2.697.445.000	91,67	2.207.736.632
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.	41,43	38.205.531.714	42,01	26.731.105.360

7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	69,64	228.945.558.373	69,88	203.089.593.502
---	--	--	-------	-----------------	-------	-----------------

Sumber Data : Sekretariat DBMSDA 2025

2.4 REALISASI ANGGARAN

Berikut ini disajikan informasi komposisi realisasi anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.13 Realisasi Anggaran DBMSDA Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		Rp	KEU (%)	FISIK (%)
2	3	4	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.429.955.018	34.255.127.760	86,88	90,95
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.205.531.714	26.731.105.360	69,97	85,84
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	228.945.558.373	203.089.254.707	88,71	97,72
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	355.139.579.791	311.892.593.502	87,82	96,52
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.573.741.000	1.028.316.630	65,34	92,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.432.550.430	1.415.637.363	58,20	70,16
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	27.733.435.292	23.469.880.949	84,63	80,78
TOTAL	693.460.351.618	601.881.916.271	86,79	95,28

Sumber : E-monev Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Bekasi melaksanakan 7 (tujuh) program, 15 Kegiatan , dengan anggaran Rp. 693.460.351.618(enam ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah. Adapun sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD).

Berdasarkan data realisasi keuangan tahun 2025, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 601.881.916.271 (enam ratus satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau bila dipresentasikan sebesar 86.79% dari total anggaran di tahun 2025. Sehingga dapat dikatakan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi telah berhasil mengefisienkan anggaran sebesar Rp. 88.812.804.846 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 13,21%.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025-2029 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan Kerjasama dan partisipasi dari semua pihak dan harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sedangkan target yang belum tercapai harus dapat diantisipasi kendala -kendala yang ada untuk dapat dicari solusinya sehingga untuk tahun mendatang capaian realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Meskipun target kinerja tahun 2025 hampir semua tercapai, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar kinerja tahun 2025 menjadi lebih baik lagi. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat Pembangunan Polder Sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi
2. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran, metode, dan sumber daya pendukung lainnya Meningkatkan kualitas seluruh dokumen Perencanaan.
3. Memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis.
5. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik.
6. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait serta partisipasi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2025 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bekasi, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air,



IDISUTANTO,ST.,MM.,MT

Pembina/ IV.a

NIP. 19770223 200212 2 006

